

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN  
PERKEBUNAN OLEH MASYARAKAT UNTUK PENCEGAHAN  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

**Diajukan Oleh:**

**ANDRI FIRDAUS**

**1410112070**

**HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA ALAM ( PK VIII )**



**Pembimbing :**

**Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum**

**Lerri Pattra, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

# **PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN OLEH MASYARAKAT UNTUK PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

Andri Firdaus, 1410112070, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Agraria Dan Sumber Daya Alam (PK VIII), 56 halaman – Tahun 2018

Pembimbing : Dr. Kurnia Warman, SH.,M.Hum dan Lerry Pattra, S.H., M.H

## **ABSTRAK**

Pengawasan merupakan suatu upaya untuk melakukan pemantauan terhadap pembinaan yang telah diberikan serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus untuk menghentikan lebih dini adanya pelanggaran agar terhindar akibat yang buruk. Pembukaan lahan adalah kegiatan yang dilakukan dalam usaha tani yang didalamnya terdapat perencanaan tata dan tata letak kegiatannya meliputi pengukuran area, pembangunan infra struktur dan pembersihan lahan sampai lahan siap ditanami. Proses pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Dan/Atau Kerukan Lingkungan Hidup. Namun sayangnya aturan tersebut aturan lainnya tidak mengatur terkait izin kepada masyarakat, sehingga demikian terkesan memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan pelanggaran dalam hal pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat dengan cara membakar. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. 2) Bagaimana pengawasan Pemerintah terhadap pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Dharmasraya. 3) Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap pembukaan lahan perkebunan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Dari hasil penelitian dilapangan masih ada masyarakat menyalahi aturan yang berlaku, hal ini dikarenakan aturan yang kurang tegas serta elemen-elemen pendukung dalam pengawasan yang kurang. Sehingga efektifitas pengawasan itu kurang, maka dari itu perlunya ditingkatkan kembali segala bentuk kekurangan yang ada tersebut.